

PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU

TINDAK PIDANA PERZINAHAN

SKRIPSI



Oleh :

ARIQ ABDURRAHMAN DARUSMAN
18300103

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

**PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU
TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Oleh :

ARIQ ABDURRAHMAN DARUSMAN
18300103

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2022

PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU

TINDAK PIDANA PERZINAHAN

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ARIQ ABDURRAHMAN DARUSMAN

18300103

SURABAYA, 20 JUNI 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Sudahnas S.H., M.Hum

**PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI
PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

**ARIQ ABDURRAHMAN DARUSMAN
18300103**

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 5 JULI 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Ahmad Basuki, S.H, M.H.

KETUA

2. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H, M.H.

ANGGOTA

3. Sudahnan, S.H., M.Hum.

ANGGOTA

1.
2.
3.

MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan,

Hanya tidak ada sesuatu yang mudah”

-Napoleon Bonaparte-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis, terutama kedua orangtua, papa dan mama yang selalu memberi dukungan baik doa maupun dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang mendalam.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih atas dukungan maupun bantuan yang telah diberikan kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ari Purwadi S.H, M.Hum. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Sudahnan S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga maupun kerabat penulis, teruntuk sobat kampus Alif, Erlangga, Piu, Agung, Alan, Rahma, Izza, Alvira, Ajeng terimakasih atas dukungan melawan kemalasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk sobat pasukan upluk-upluk Adji, Dandy, Hilmi, Naufal, Ravi, Riga, Ryan yang selalu bersama selama 10 tahun ini dan menjadi tempat melepas penat penulis selama pengerjaan. Teman-teman Angkatan 2018, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang terus bersama dari maba sampai lulus. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik lewat dukungan pikiran maupun semangat, dan semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada kata yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih yang mendalam dan semoga Allah SWT yang membalasnya.

Hormat saya



Ariq Abdurrahman Darusman

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ariq Abdurrahman Darusman

NPM : 18300103

Alamat : Jl. Jazuli No. 16, Kenjeran, Surabaya.

No. Telp (HP) : 081234521422

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **PEMECATAN DINAS MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buka tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan,



ARIQ ABDURRAHMAN DARUSMAN

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya menjaga pertahanan negara harus memiliki jiwa disiplin yang tinggi dan bertugas sesuai dengan perintah dan aturan yang berlaku. Namun, sering dijumpai pula anggota TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, salah satu kasus yang sering ditemui adalah kasus perzinahan yang melibatkan warga sipil maupun sesama anggota TNI yang berujung pada pemecatan bagi anggota TNI yang menjadi pelakunya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemecatan Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Perzinahan” yang bertujuan, *pertama* untuk mengetahui bagaimana proses penerapan hukum bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan berupa perzinahan. *Kedua*, untuk menganalisis sanksi hukum berupa pemecatan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI. Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang merupakan hukum pidana khusus karena hanya berlaku untuk anggota militer saja. Penjatuhan sanksi terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum sehingga dapat menjadi bukti ketegasan aturan-aturan hukum yang berlaku terutama dalam lingkup militer.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif – kualitatif, yaitu dengan melakukan studi bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, *Pertama* : bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan berupa perzinahan akan diproses dalam Peradilan Militer sesuai KUHPM sebagai hukum materilnya dan Hukum Acara Peradilan Militer sebagai hukum formilnya. Dalam peradilan militer terdapat organ-organ atau Lembaga khusus yang berwenang dalam menangani perkara di lingkup militer dan alur persidangan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Kedua* : Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dijatuhkan kepada anggota TNI yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, pemidanaan ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi anggota TNI untuk tidak melakukan pelanggaran dalam masa dinas terutama pelanggaran kesusilaan yang melibatkan sesama pihak yang termasuk dalam Keluarga Besar TNI, penjatuhan pidana ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam Pengadilan Militer dan juga dapat melalui Administrasi Prajurit di Kesatuannya.

Kata Kunci : Proses Hukum Pidana Militer, Pemecatan Dinas Militer, KUHPM

ABSTRACT

The Indonesian National Army (TNI) in carrying out its duties to maintain the country's defense must have a high spirit of discipline and serve in accordance with applicable orders and rules. However, there are also often TNI members who commit disciplinary violations and criminal acts, one of the cases that are often encountered is cases of adultery involving civilians and fellow TNI members which result in the dismissal of TNI members who are the perpetrators. Based on this, the author is interested in conducting research with the title "Dismissal of Military Service Against TNI Members Perpetrators of Adultery Crimes" which aims, first, to find out how the process of applying the law for TNI members who commit criminal acts of decency in the form of adultery. Second, it isto analyze legal sanctions in the form of dismissal of perpetrators of moral crimes committed by members of the TNI. This additional criminal sanction of dismissal from military service is regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), which is a special criminal law because it only applies to members of the military. The imposition of sanctions on TNI members who are proven to have committed the crime of adultery is a form of legal responsibility so that it can be evidence of the firmness of the applicable legal rules, especially within the military sphere.

The research method used in this thesis research uses a type of normative juridical research with an approach that hasa descriptive – qualitative nature, namely by conducting a study of pustaka material or secondary data as a basic material to be researched by understanding the regulations and literature relevant to the problem under study.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded, first : for members of the TNI who commit criminal acts of decency in the form of adultery will be processed in the Military Court in accordance with the Criminal Code as the material law and the Procedural Law of military justice as the legal law. In military courts, there are organs or special institutions that are authorized to handle cases in the military scope and the flow of trials that have been determined in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Second : Additional criminal sanctions for dismissal from military service are imposed on members of the TNI who are considered no longer fit to be maintained in military service, this punishment aims to provide a deterrent effect for TNI members not to commit violations during their service, especially violations of decency involving fellow parties belonging to the TNI Big Family, this criminal conviction is based on the consideration of a panel of judges in the Military Courts and can also go through the Soldier Administration in his Unit.

Keywords : *Military Criminal Law Process, Dismissal of Military Service, KUHPM*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	18
F. Pertanggung Jawaban Sistematika	20
BAB II : PROSES HUKUM MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN	22

A. Tindak Pidana Perzinahan dalam Lingkungan Militer.....	22
B. Proses Hukum Peradilan Militer Pelaku Tindak Pidana Perzinahan	27
BAB III : PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN	
TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN	35
A. Pidana Tambahan Pemecatan Dinas Militer	35
B. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Perzinahan	40
BAB IV : PENUTUPAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR BACAAN	51